

PERAN MEDIA MASSA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMERINTAHAN LOKAL BERBASIS *HUMAN SECURITY* DI KOTA JAYAPURA

Aria Aditya Setiawan

Abstract

Mass media constitute the backbone of a good governance especially in a local governance. The media supply the amount of political information that voters base their decisions on. They identify problems in our society and serve as a medium for deliberation. They also play as a watchdogs that we can rely on for uncovering errors and wrongdoings by those in power. The mass media always be a part of people's life to protect their basic rights. This paper offers two aspects to be reconsidered, first, it will explain the role of mass media in local governance, and the second one, will explain the effect of mass media toward human security in Papua.

Keywords : mass media, local governance, human security

A. PENDAHULUAN

Rasa ingin tahu manusia terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya sangatlah besar. Dari zaman ke zaman dapat terlihat perubahan dalam suatu sistem kebudayaan yang pastinya terdapat di dalam masyarakat akibat dari rasa ingin tahu manusia yang besar tersebut. Berawal dari rasa ingin tahu, manusia selalu mengeksplorasi apa yang ada di sekitarnya, baik atau buruk, kemudian ingin menyampaikan hasilnya kepada orang lain. Bertahap dari komunikasi yang semula bersifat personal, kemudian dapat berkembang menjadi proses penyampaian pesan yang bersifat massal, sehingga informasi menjadi lebih luas jangkauannya serta dapat merubah suatu pola kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi.

Media massa merupakan salah satu sarana untuk pengembangan kebudayaan, bukan hanya budaya dalam pengertian seni dan simbol tetapi juga dalam pengertian pengembangan tatacara, mode, gaya hidup dan norma-norma. (*Mc Quail*, 1987:1). Media massa sangat berperan dalam perkembangan atau bahkan perubahan pola tingkah laku dari suatu masyarakat, oleh karena itu kedudukan media massa dalam masyarakat sangat penting. Dengan adanya media massa, masyarakat yang tadinya dapat dikatakan tidak beradab dapat menjadi masyarakat yang beradab. Hal itu disebabkan, oleh karena media massa mempunyai jaringan yang luas dan bersifat massal sehingga masyarakat yang membaca tidak hanya orang-perorang tapi sudah mencakup jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan pembaca, sehingga pengaruh media massa akan sangat terlihat di permukaan masyarakat.

Mengingat kedudukan media massa dalam perkembangan masyarakat sangatlah penting, maka industri media massa pun berkembang pesat saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya stasiun televisi, stasiun radio, perusahaan media cetak, baik itu surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya. Para pengusaha merasa diuntungkan dengan mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang media massa seperti itu. Hal itu disebabkan karena mengelola perusahaan dengan jenis spesifikasi mengelola media massa adalah usaha yang akan selalu digemari masyarakat sepanjang masa, karena sampai kapanpun manusia akan selalu haus akan informasi.

Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan kebutuhan informasi melalui medianya baik melalui media cetak maupun media elektronik seperti, radio, televisi, internet. Fungsi informatif yaitu memberikan informasi, atau berita, kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Pers akan memberitakan kejadian-

kejadian pada hari tertentu, memberitakan pertemuan-pertemuan yang diadakan, atau pers mungkin juga memperingatkan orang banyak tentang peristiwa-peristiwa yang diduga akan terjadi (Budyatna, 2006:27).

Peran media massa dalam kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat modern telah memainkan peranan yang begitu penting. Menurut **McQuail** dalam bukunya **Mass Communication Theories**, ada enam perspektif dalam hal melihat peran media. (**McQuail**, 2000:66) :

Pertama, melihat media massa sebagai **window on event and experience**.

Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Atau media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa.

Kedua, media juga sering dianggap sebagai **a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection**.

Cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Karenanya para pengelola media sering merasa tidak “bersalah” jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi dan berbagai keburukan lain, karena memang menurut mereka faktanya demikian, media hanya sebagai refleksi fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Padahal sesungguhnya, **angle**, arah dan **framing** dari isi yang dianggap sebagai cermin realitas tersebut diputuskan oleh para profesional media, dan khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui apa yang mereka inginkan.

Ketiga, memandang media massa sebagai filter, atau **gatekeeper** yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa memilih isu, informasi atau bentuk **content** yang lain berdasar standar para pengelolanya. Disini khalayak “dipilihkan” oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui dan mendapat perhatian.

Keempat, media massa seringkali pula dipandang sebagai **guide**, penunjuk jalan atau **interpreter**, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian, atau alternatif yang beragam.

Kelima, melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik.

Keenam, media massa sebagai **interlocutor**, yang tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif.

Pendeknya, semua itu ingin menunjukkan, peran media dalam kehidupan sosial bukan sekedar sarana **diversion**, pelepas ketegangan atau hiburan, tetapi isi dan informasi yang disajikan, mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Isi media massa merupakan konsumsi otak bagi khalayaknya, sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi realitas subjektif pelaku interaksi sosial. Gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh isi media massa inilah yang nantinya mendasari respon dan sikap khalayak terhadap berbagai objek sosial. Informasi yang salah dari media massa akan memunculkan gambaran yang salah pula terhadap objek sosial itu. Karenanya media massa dituntut menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Kualitas informasi inilah yang merupakan tuntutan etis dan moral penyajian media massa.

Beranjak dari peran media massa diatas, maka sangat penting artinya ketika media massa lokal di Kota Jayapura turut serta menjadi bagian dalam proses peningkatan **local governance**. Salah satu fungsi yang bisa dimainkan disini adalah sebagai

media komunikasi antara pemimpin dengan rakyatnya mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan telah ditetapkan, sekaligus juga sebagai sarana input dari rakyat kepada pemimpin di daerah. Komunikasi yang efektif merupakan elemen mendasar dari demokrasi, sekaligus landasan penting bagi terjalannya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.

Cara pejabat lokal mengkomunikasikan opsi-opsi mereka kepada masyarakat, dan cara masyarakat menyuarkan aspirasi dan keluhan mereka kepada pemerintah, itulah inti dari partisipasi masyarakat. Sementara itu, para pejabat lokal dan oronp perlu berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui masalah umum yang mereka hadapi berikut solusi efektifnya. Di samping itu, salah satu fungsi pemerintahan berakar dalam hubungan komunikatif antara warga masyarakat dan para pengambil kebijakan, dan forum-forum pemuka masyarakat. Pejabat lokal memberi pendidikan kepada masyarakat perihal isu-isu yang berkembang dalam masyarakat, misalnya tantangan serta berbagai opsi yang mereka hadapi, petunjuk praktis yang diperlukan, berbagai peluang dan hambatan yang ada, serta berbagai alternatif bagi berbagai kebijakan pemerintah berikut implementasinya. Sebaliknya, warga masyarakat mendidik para pejabat dengan masukan-masukan mereka tentang masalah yang mereka alami, berbagai kebutuhan mereka, serta pendapat mereka tentang kelayakan dari solusi yang disodorkan pemerintah.

Komunikasi juga tidak bisa dipisahkan dari hak asasi masyarakat atas informasi, serta prinsip transparansi dalam institusi dan proses-proses pemerintahan. Komunikasi memiliki sisi pendidikan. Komunikasi yang efektif tentang risiko yang dihadapi bersama, misalnya, merupakan fungsi dari kepemimpinan dan sebuah langkah proaktif untuk mendengarkan, serta berbagi pengetahuan dan informasi.

Media massa lokal di Kota Jayapura mempunyai peranan penting dalam hal ini, karena media massa bisa berperan sebagai mata dan telinga, bahkan anjing penjaga, dan sekaligus pemain dalam penetapan agenda pemerintahan lokal. Pers yang kompeten dan sarat informasi yang menjunjung prinsip-prinsip kompetensi, akurasi, dan kejujuran, sangat penting artinya bagi pemerintahan lokal yang demokratis. Media lokal dapat ikut andil menyusun agenda publik, melakukan investigasi independent tentang pelbagai isu, serta memberikan liputan yang akurat dan transparan tentang proses kebijakan yang bergulir di pemerintahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran media massa khususnya media massa lokal sebagai media komunikasi dalam meningkatkan *local governance* berbasis *human security* di Kota Jayapura.

A.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengkhususan penelitian yang bersifat eksploratif, dalam rangka menjelaskan bagaimana peran media massa dalam peningkatan *local governance* berbasis *human security* di Kota Jayapura. Alasan digunakan Kota Jayapura sebagai lokasi penelitian karena Kota Jayapura saat ini terjadi dinamika proses politik dan pemerintahan terkait adanya Undang-undang Otonomi Khusus Papua, dimana UU Otsus Papua dilahirkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat asli di Papua di berbagai bidang kehidupan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan data-data sekunder diperoleh dari berbagai macam informasi baik melalui media cetak,

berbagai literatur perpustakaan dan informasi tokoh (akademisi) yang concern terhadap lokalitas.

Dalam usaha untuk mengumpulkan data, penyusun akan menggunakan beberapa teknik yang saling menunjang dan melengkapi yaitu teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisa data pada penelitian ini mempergunakan analisa kualitatif, yang dilakukan secara bersamaan mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi dari data mentah yang ada dilapangan (baik berupa hasil tertulis maupun wawancara). Penyajian data bermaksud untuk menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan terhadap penarikan kesimpulan.

A.2. Human Security Concept

Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non-tradisional. (Al Araf & Anton Ali Abbas, et.al., 2008)

Pemikiran yang kurang lebih sama dikembangkan oleh pendekatan *critical security studies* (studi keamanan kritis). Pendekatan ini menolak asumsi bahwa keamanan dicapai melalui akumulasi kekuatan. Sebaliknya, ia beranggapan bahwa pondasi dari keamanan adalah keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Pencapaian kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial, melalui penyediaan pendidikan, pengurangan kemiskinan, kebebasan dari tekanan politik, akan membuat individu maupun kelompok mendapatkan keamanannya. Maka, bagi *Critical Security Studies*, keamanan hadir ketika masyarakat terbebaskan dari kemiskinan (bebas berkeinginan/ *freedom from want*) dan bebas dari ketakutan (*freedom from fear*). Bukan dengan cara memantapkan stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan tertentu yang cenderung membatasi kebebasan masyarakat. Beberapa cabang dari pendekatan keamanan non tradisional antara lain konstruktivisme (*constructivism*), sekuritisasi (*securitization*) dan keamanan manusia (*human security*).

Masalah utama yang hendak disorot melalui konsep *human security* adalah dominasi negara dan aparatnya dalam mendefinisikan, membuat serta menerapkan kebijakan keamanan nasional, yang amat menekankan faktor keamanan berdasarkan teritorial, kalkulasi militer, dan stabilitas politik, yang tidak jarang mengesampingkan atau bahkan menafikkan kepentingan dan kebutuhan orang per orang akan keamanan yang lebih komprehensif. Adanya dominasi negara yang terkadang berlebihan inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu utama munculnya desakan bagi implementasi kebijakan keamanan yang lebih komprehensif, termasuk dengan memasukkan komponen-komponen keamanan manusia yang berdasarkan konsep hak azasi manusia secara universal.

Dimensi sosial sangat terkait erat dengan salah satu aspek penting dalam konsepsi keamanan yang diajukan Buzan, yaitu keamanan individu. Setidaknya ada empat bentuk dasar ancaman bagi individu dalam konteks sosial, antara lain: *physical threats (pain, injury, death)*, *economic threats (seizure or destruction of property, denial of access to work or resources)*, *threats to rights (imprisonment,*

denial of normal civil liberties), dan *threats to position or status (demotion, public humiliation)*.

Francis Fukuyama berpendapat bahwa “*all persons have a drive to be respected, and that the ultimate form of personal respect finds satisfaction in the idea of human rights*”. Pendapat ini kemudian dijadikan konsepsi dasar dari *human security* yang diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam *Human Development Report 1994* oleh UNDP, dimana UNDP mengajukan rumusan baru untuk keamanan yang diawali dengan pemahaman bahwa keamanan berarti: “keamanan dari ancaman terus-menerus dari rasa lapar, penyakit, kejahatan, dan penindasan.... perlindungan terhadap gangguan yang membahayakan atas kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, masyarakat atau lingkungan” Lebih jauh, UNDP mengidentifikasi tujuh komponen *human security*, yaitu *economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, dan political security*.

Berkaitan dengan masalah definisi, beberapa analis telah mencoba secara cermat untuk merumuskan definisi yang tepat atas konsep *human security*. Menurut 1994 *Human Development Report* yang dikeluarkan oleh the *United Nations Development Programme* (UNDP), definisi konsep *human security* mengandung dua aspek penting. Pertama, *human security* merupakan “keamanan (manusia) dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi”. Kedua, *human security* pun mengandung makna adanya “perlindungan atas pola-pola kehidupan harian seseorang, baik di dalam rumah, pekerjaan, atau komunitas dari gangguan-gangguan yang datang secara tiba-tiba serta menyakitkan” (*Human Security has two central aspect: It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease, and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs, or in communities*). Selanjutnya, konsep dasar *human security* menekankan pentingnya empat karakteristik esensial, yaitu bahwa konsep *human security* haruslah universal; interdependen; terjamin melalui pencegahan dini; dan berbasis pada penduduk (*people-centred*).

Model *human security* ini menyetujui kesejahteraan perorangan yang harus dijamin oleh negara. Artinya, referensi keamanan supaya bergeser dari negara ke perorangan. Referensi itu berpusat pada keamanan atau ketidakamanan manusia sebagaimana ia terkait dengan negara, tatanan internasional, atau masyarakat internasional. Faktor-faktor seperti kecepatan dan jangkauan perubahan teknologi dan internasionalisasi pasar dan keuangan (atau globalisasi) memperlihatkan betapa nasib manusia diombang-ambingkan secara radikal oleh kekuatan-kekuatan di luar kendali negara nasional dengan struktur pengelolaan (*governance*) yang berpusat pada negara. Sebagai akibat dari globalisasi ini pengamanan manusia sebagai perorangan harus mendapatkan perhatian utama.

Dari berbagai definisi mengenai *human security*, dapat diambil suatu penjelasan bahwa *human security* menetapkan perorangan dan masyarakat sebagai ukuran keamanan, dan bukan negara. Konsep ini mengakui bahwa keamanan negara itu penting tetapi tidak cukup untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia. Datangnya ancaman dilihat dari sumber militer maupun non-militer seperti perang dalam suatu negara, proliferasi senjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kejahatan, dan obat-obatan terlarang. Keamanan manusia menganggap keselamatan dan kesejahteraan manusia sebagai bagian integral dari pencapaian perdamaian dan keamanan global. Konsep ini melengkapi, tetapi tidak menggantikan, keamanan nasional. Keamanan manusia mengambil manusia

sebagai titik referensinya dan tidak hanya memusatkan perhatian pada wilayah atau kedaulatan.

A.3. Good Local Governance

Hal terpenting yang memaknai terselenggaranya pemerintahan lokal yang demokratis adalah konsep pemerintahan yang otonom (*self-government*) serta pemerintahan yang paling menyentuh masyarakat. Gagasan terpentingnya adalah penduduk suatu wilayah harus mendapatkan hak dan tanggung jawab untuk membuat keputusan menyangkut isu-isu yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka dan yang untuk itu mereka mampu mengambil keputusan. Urusan-urusan seperti pertahanan nasional, politik luar negeri, dan keamanan secara langsung memang berpengaruh terhadap kehidupan mereka, namun soal-soal seperti itu jelas terlalu berat untuk ditangani pemerintah setingkat kotapraja, sehingga mau tidak mau hal itu menjadi beban tanggung jawab pemerintah pusat.

Ada dua cara untuk memahami demokrasi lokal, yakni:

1. Di dalam *lembaga-lembaga* pemerintahan lokal seperti walikota, dewan kota atau DPRD, komite-komite, dan pelayanan administratif; dan
2. Di dalam pengorganisasian dan aktivitas masyarakat (*civil society*).

Idealnya, para pejabat lokal dan gerakan-gerakan masyarakat madani bekerja sama dalam hubungan yang saling memperkuat dan mendukung untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, serta mencari solusi yang inovatif. Pemerintah hanya satu bagian saja dari gambaran utuhnya, meski berkedudukan penting. Gagasan mengenai kegiatan masyarakat berupa organisasi kemasyarakatan, berbagai asosiasi, kegiatan usaha, panitia-panitia di kampung, dan semacamnya juga menempati kedudukan penting di dalam konsep pemerintahan lokal.

Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi. Pada saat yang sama ada pemahaman umum mengenai proses-proses terpenting dari kehidupan demokratis yang dapat diterapkan secara universal.

Ciri-ciri demokrasi lokal yang berkualitas, antara lain :

1. Kehidupan berdemokrasi mengharuskan adanya pemilu berkala (atau reguler) dan murni dan kekuasaan bisa dan harus berpindah tangan melalui proses pemilihan yang jujur, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan.
2. Dalam berdemokrasi, oposisi dan minoritas berhak untuk menyuarakan pandangan mereka dan mempunyai pengaruh (yakni bukan semata-mata memperoleh kursi atau suaranya terwakili) di dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Jika suara minoritas tidak dapat diakomodasi, oposisi harus legal dan loyal dan tidak bertindak di luar institusi yang sah dan dengan kekerasan.
3. Harus selalu ada kesempatan melakukan pergantian di dalam menjalankan pemerintahan koalisi. Artinya, para pemilih harus bisa mencopot politisi-politisi tertentu dari jabatan yang mereka duduki dan menggantikannya dengan kepemimpinan baru.
4. Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik yang paling dasar.
5. Terakhir, banyak yang percaya demokrasi juga harus disertai oleh hak-hak yang menyangkut masalah pembangunan, ekonomi, dan lingkungan,

misalnya fasilitas air bersih, perumahan, dan kesempatan memperoleh pekerjaan.

Pembahasan mengenai makna demokrasi lokal juga harus mempertimbangkan pula *pengaruh-pengaruh kebudayaan* terhadap cara orang berpikir tentang demokrasi. Ada budaya yang memiliki tradisi berperan sertanya warga masyarakatnya dalam proses politik, sementara ada pula yang masyarakatnya acuh tidak acuh apakah pejabat suatu wilayah ditunjuk atau dipilih. Hal terpenting adalah di dalam demokrasi tingkat lokal praktik-praktik tradisi yang telah mendarah daging di masyarakat, misalnya peranan pemimpin atau tokoh tradisional perlu diintegrasikan secara hati-hati ke dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

Munculnya istilah *governance* mendorong para ilmuwan politik untuk tidak sekedar memperhatikan pemerintah sebagai lembaga, melainkan juga pemerintahan sebagai proses multiarah, yaitu proses memerintah yang melibatkan pemerintah dengan unsur-unsur di luar pemerintah. *Governance* tidak sama dengan *government*, tetapi *governance* adalah proses pemerintahan dalam arti yang luas. Menurut Jon Pierre dan Guy Peters, *governance* adalah sebuah konsep yang berada dalam konteks hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya, dan mungkin melengkapi sebuah proyek yang membuat ilmu politik mempunyai relevansi dengan kebijakan publik. Selain itu, ketika berpikir mengenai *governance*, berarti berpikir tentang bagaimana mengendalikan negara, ekonomi, dan masyarakat, serta bagaimana mencapai tujuan-tujuan bersama.

Pada level lokal, *local governance* adalah sebuah proses yang didalamnya *outcomes* pemerintahan bergantung pada interaksi dari sekumpulan institusi kompleks dan aktor yang diambil dari pemerintahan lokal dan dari pemerintahan di luar pemerintahan lokal.

Definisi ini merangkum tiga ciri pokok *governance*, yaitu :

1. Definisi ini menafsirkan *governance* sebagai sebuah proses bukan sebuah keadaan tujuan, dengan demikian menangkap dinamika perubahan yang ada.
2. Ia mengisyaratkan ke arah pertumbuhan jaringan kerja, kemitraan, dan organisasi-organisasi lain dalam masyarakat sipil yang terlibat dalam pemerintahan.
3. Dari sudut pandang *sosio-centric*, menekankan jaringan kerja yang fleksibel dan mudah berkembang, dan kemitraan dalam masyarakat sipil yang mampu memerintah diri mereka sendiri bebas dari kontrol negara.

Dalam konteks ini, peran *local governance* dalam menangani berbagai masalah yang timbul di Kota Jayapura sangatlah penting. Selama ini peran pemerintah pusat begitu dominan karena tidak saja urusan tersebut menjadi kuasa pemerintah pusat tetapi menawarkan sejumlah aktivitas yang meningkat diantara penduduk yang bermukim di wilayah Papua.

Dari sini memang diperlukan kesadaran baru, bahwa pelibatan *local governance* adalah suatu kenyataan di negara yang sudah menerapkan sistem demokrasi sebagai sistem politiknya, dimana kebijakan desentralisasi menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, keterlibatan di luar pemerintahan lokal seperti masyarakat sipil dan organisasi-organisasi terkait menjadi faktor yang penting.

B.1. Peran Media Massa di Kota Jayapura

Dalam konteks ini, peran media massa sebagai sarana untuk mewujudkan *local governance* di Kota Jayapura sangatlah penting. Media massa, atau dalam

dunia jurnalistik dikenal sebagai Pers, memiliki berbagai macam peran. Peran pertama dan utama adalah menyiarkan informasi (*to inform*), entah informasi tentang peristiwa yang terjadi, gagasan, atau pikiran orang. Orang membaca surat kabar terutama karena ingin mencari informasi.

Peran kedua adalah mendidik (*to educate*). Lewat pemberitaannya, pers mencoba memberi pencerahan, mencerdaskan, dan meluaskan wawasan khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsanya. Dalam konteks politik, pers memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menyadarkan mereka akan hak dan kewajibannya sebagai warga.

Peran ketiga adalah menghibur (*to entertain*). Hal-hal yang bersifat menghibur sering kita temukan di media massa seperti: berita seputar selebritis, teka-teki silang, cerita bersambung, dan lain-lain— sebagai selingan dari berita-berita berat yang lain.

Peran keempat adalah mempengaruhi (*to influence*). Media yang independen dan bebas dapat mempengaruhi dan melakukan fungsi kontrol sosial (*social control*). Yang dikontrol bukan cuma penguasa, pemerintah, parlemen, institusi pengadilan, militer, tetapi juga berbagai hal di dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan UU No. 40/1999 tentang Pers, salah satu fungsi media massa adalah sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Ketika pemerintah sebagai badan regulator tidak berbuat maksimal saat terjadi pelanggaran keamanan manusia (keamanan individu), media massa dengan sigap harus 'bersuara' sehingga adanya pelanggaran hak-hak individu masyarakat lebih lanjut dapat dihindari. Persoalannya, apakah media massa, terutama media massa lokal di Kota Jayapura sudah melaksanakan fungsi ini? Apakah media massa lokal sudah menjadikan persoalan yang menyangkut hak-hak individu masyarakat di Kota Jayapura sebagai agenda publik yang wajib diperjuangkan dari awal hingga akhir? Sudahkah media massa lokal membuat investigasi yang menjelaskan pola pelanggaran hak-hak individu masyarakat dan siapa saja yang terlibat di dalamnya?

Dengan demikian, media massa lokal di Kota Jayapura sebetulnya mempunyai kesempatan besar dalam ikut secara serius dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut pemenuhan hak-hak individu masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Untuk itu perlu ada inventarisasi dan pemetaan persoalan pelanggaran hak-hak individu yang ada serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat umum. Bila inventarisasi dan pemetaan persoalan tersebut sudah ditetapkan, maka advokasi pun dapat segera dilakukan. Liputan yang terus menerus terhadap persoalan ini akan memaparkan kepada publik apa yang menjadi akar persoalannya, siapa yang melakukan pelanggaran itu dan sejauh mana tanggapan dari pemerintah. Harapannya seluruh anggota *local community* akan tergerak untuk segera menyelesaikannya. Media massa di Kota Jayapura, baik cetak maupun elektronik, bisa menjadi ujung tombak kampanye perbaikan perlindungan hak-hak individu masyarakat. Peran media menjadi amat penting, mengingat pelanggaran hak-hak individu yang nantinya berujung pada keamanan manusia sudah terlalu jauh, sementara kesadaran masyarakat akan masalah ini masih perlu ditumbuhkan.

Dari sini memang diperlukan kesadaran baru, bahwa pelibatan media massa khususnya media massa lokal di Kota Jayapura dalam pelaksanaan *good local governance* adalah suatu kenyataan di negara yang sudah menerapkan sistem demokrasi sebagai sistem politiknya, dimana media massa dapat memainkan peranannya bagi kehidupan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, keterlibatan di luar

pemerintahan lokal seperti masyarakat sipil dan organisasi-organisasi terkait menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

C. PENUTUP

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa karena perkembangan global yang kini sedang melanda dunia, isu maupun agenda *local governance* dan *human security* patut dilihat secara multidimensional. Kunci penyelesaian secara komprehensif terhadap berbagai persoalan diatas tidak cukup dengan pendekatan hukum dan militer saja, namun perlu mengintegrasikan berbagai pendekatan lainnya dan melibatkan semua komponen masyarakat.

Seharusnya, dengan melibatkan *local governance* tidak saja memberikan solusi kepada pemerintah pusat untuk membagi beban itu kepada pemerintahan di tingkat lokal, tetapi memberikan sebuah alternatif baru pemecahan masalah-masalah yang nantinya akan timbul dengan pendekatan dan kearifan nilai-nilai masyarakat lokal.

Media massa khususnya media massa lokal di Kota Jayapura, baik cetak maupun elektronik, bisa menjadi ujung tombak kampanye perlindungan hak-hak individu masyarakat di Papua, karena media massa mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan karakter masyarakat yang dapat mengajak masyarakat turut serta dalam proses perlindungan hak-hak keamanan manusia. Selain itu, media massa harus bersikap netral terhadap segala kepentingan baik itu bersifat politis, ekonomi, dan kepentingan-kepentingan lainnya, demi menjaga kredibilitas pemberitaannya. Media massa bisa menjadi sponsor atau rekan kerja bagi acara atau program yang mendukung penguatan hak-hak individu masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan yang berbasis *human security*.

DAFTAR RUJUKAN

- Araf, Al dan Abbas, Anton Ali et.al., 2008, *TNI-POLRI di Masa Perubahan Politik*, Program Magister Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Baylis, John dan Smith, Steve, 2001 *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford University Press.
- Budyatna, Muhammad. 2006, *Jurnalistik Teori Dan Praktek*, Rosda, Bandung.
- Forsythe, David P. *Human Rights and International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press.
- McQuail, Denis, 1987, *Teori Komunikasi Massa*, Erlangga, Jakarta.
-,2000, *Mass Communication Theories*, Fourth edition, Sage Publication, London.
- Pierre, Jon dan Peters, Guy, 2000, *Governance, Politics, and State*, MacMillan Press, London.
- Setiawan, Aria Aditya, 2005, *Implementasi dan Implikasi Undang-undang Otonomi Khusus bagi Human Security di Papua*, Tesis, Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Studi Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Stoker, Gary, 1994 *The Role and Purpose of Local Governance*, Commision of Local Democracy, London.
- Subianto, Landry Haryo, 2002, *Konsep Human Security: Tinjauan dan Prospek*, Analisis CSIS Tahun XXXI/2002 No.1.
- Suyatno, 2008 *Globalisasi, Perbatasan Indonesia-Malaysia, dan Local Governance*, Paper, UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Tehrani, Majid, 1999, *Worlds Apart Human Security and Global Governance*, I.B. Tauris & Co.Ltd, London and New York.
- Vermonte, Philip Jusario, 2002, *Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya*, Analisis CSIS Tahun XXXI/2002 No.1.
- Data primer TNI-AL, 2008.
- Data primer *Conservation International Indonesia Papua program*, 2005.
- http://www.globalcenters.org/cgcp/english/html_documents/publications/changes/issues/index1.htm.
- UU RI No. 40/1999 tentang Pers

